

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di Indonesia sedang terjadi perubahan kurikulum yang sudah diimplementasikan di beberapa sekolah setanah air. Perubahan kurikulum ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dimulai ketika masa pandemi Covid-19 dan berlanjut hingga masa pemulihan. Kurikulum yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe kini mendapatkan nama Kurikulum Merdeka, yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar (Rahmawati dkk., 2022) yang diusung pemerintah melalui Kemendikbudristek, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar unggul dan memiliki daya saing tinggi, serta untuk menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia akan perubahan dalam bidang teknologi, sosiokultural, dan lingkungan (Hadiansah, 2022). Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang mengatur pembelajaran intrakurikuler yang beragam, sehingga konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Kemendikbud, 2022). Kurikulum ini menjadi kerangka yang lebih fleksibel yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik (Kemendikbudristek, 2023; Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2022).

Suatu kurikulum perlu diimplementasikan melalui proses pembelajaran di kelas. Implementasi kurikulum merupakan bentuk nyata dari kurikulum yang telah dirancang, sehingga keberhasilan kurikulum dapat dinilai ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh guru dan siswa. Implementasi kurikulum mengacu pada bagaimana guru mempraktikkan kurikulum; bagaimana mereka mengajar dan mengevaluasi siswa (Amanda, 2022; Karakus, 2021). Implementasi kurikulum pada dasarnya melibatkan berbagai pihak, tetapi guru secara khusus memiliki peran penting di dalamnya, karena gurulah yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas (Fauzan & Arifin, 2022, hlm. 11).

Pada pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka diimplementasikan secara terbatas pada sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam Program Sekolah Penggerak untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat, dan secara khusus program SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) pada Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024, kurikulum ini dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh seluruh sekolah di Indonesia dan menjadi kurikulum nasional (Kemendikbud, 2022). Saat ini, di Indonesia sudah ada 142.000 sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, secara spesifik 2500 sekolah yang mengikuti Sekolah Penggerak, dan 901 sekolah SMK-PK (Anggreana, Felicia, dkk., 2022).

Terjadinya perubahan kurikulum berarti bukan hanya perubahan pada nama atau nomenklatur saja, melainkan juga perubahan pada metode mengajar, media yang digunakan, pola interaksi di dalam kelas, buku ajar, dan lain-lain (Efferi, 2018). Sehingga, pihak pertama yang merasakan dampak akibat adanya perubahan kurikulum adalah satuan pendidikan atau guru. Para guru harus siap untuk mengimplementasikan kurikulum baru yang diberlakukan di Indonesia, karena keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh mereka. Komponen lain seperti biaya, sarana dan prasarana, metode, dan pendekatan tidak akan berarti apabila para guru tidak siap dan kurikulum tidak dijalankan dengan baik (Amanda, 2022). Gurulah yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, karena guru yang mengetahui berbagai permasalahan dalam kurikulum yang dilaksanakan (Anggraini dkk., 2022; Fauzan & Arifin, 2022). Hamalik (dalam Fauzan & Arifin, 2022) menyatakan bahwa guru menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum, karena setiap guru memiliki tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengadministrasian, dan perubahan kurikulum.

Perencanaan kurikulum menjadi salah satu tanggungjawab guru sebagai pengembang dan pelaksana Kurikulum Merdeka. Guru harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum di semua tahap untuk implementasi yang efektif. Guru memiliki peran sentral dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Guru bertugas merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, menentukan konten materi yang

relevan, memilih metode pengajaran yang cocok, dan mengidentifikasi penilaian yang tepat untuk mengukur kemajuan siswa (Kobiah, 2016).

Berbagai literatur membahas mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada berbagai jenjang pendidikan. Berbagai penelitian mengenai kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka telah dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar (Heryahya dkk., 2022; Septiana & Hanafi, 2022; Syaripudin dkk., 2023), Sekolah Menengah Pertama (Gunawan, 2022), dan Sekolah Menengah Atas (Farwati dkk., 2022; Kurnia & Novaliyosi, 2023) dengan subjek penelitian hanya guru dari satu mata pelajaran (Farwati dkk., 2022; Gunawan, 2022; Kurnia & Novaliyosi, 2023). Penelitian-penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka ini menunjukkan bahwa guru yang siap adalah guru yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Kurikulum Merdeka.

Pengetahuan dan pemahaman guru mengenai Kurikulum Merdeka dapat diperoleh guru melalui sumber-sumber informasi daring, pelatihan, lokakarya, dan diskusi antar guru mengenai Kurikulum Merdeka. Hal ini berakibat pada timbulnya berbagai persepsi baru pada guru terkait Kurikulum Merdeka. Persepsi dimaknai sebagai proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan seseorang untuk mendapatkan gambaran yang koheren dan bermakna (Hidayah dkk., 2022). Lebih lanjut, Hidayah dkk (2022) menjelaskan bahwa mencari informasi tentang persepsi guru tentang kurikulum baru diperlukan sehingga pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi dan mengetahui kesiapan, pemahaman, atau pendalaman guru terhadap kurikulum baru. Memahami persepsi guru sangat penting untuk mengembangkan dan mendukung profesionalisme guru secara efektif. Melalui identifikasi kesenjangan atau kesalahpahaman dalam persepsi guru, dapat dilaksanakan pelatihan, pengembangan sumber daya, dan pemberian umpan balik yang sesuai untuk membantu guru meningkatkan praktik pengajarannya dan meningkatkan hasil belajar siswa (Li & Kulm, 2008).

Untuk mengetahui kondisi empiris kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, pada bulan Februari 2023, peneliti melakukan studi pendahuluan ke salah satu SMK di Kota Bandung yang mengikuti program SMK-PK dan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Studi

pendahuluan dilakukan di SMK mengingat belum banyak penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan pada jenjang ini. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dengan membekali mereka dengan sikap profesional dan menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di masa ini dan yang akan datang (Pertwi & Pusparini, 2021). Pada Kurikulum Merdeka di jenjang SMK terdapat penyesuaian konsentrasi keahlian sehingga pembelajaran di SMK dapat menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan DUDI (Fikria, 2022). Struktur kurikulum menjadi lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu Umum dan Kejuruan. Praktik kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 1 semester, dan siswa dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Sehingga, terdapat perubahan struktur dari kurikulum sebelumnya. Penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SMK penting untuk dilakukan, mengingat pendidikan kejuruan yang menuntut siswa untuk dapat beradaptasi dengan dinamika DUDI yang melaju cepat, terlebih dengan hadirnya teknologi. Sehingga guru, melalui Kurikulum Merdeka, harus mampu memberikan siswa bekal yang cukup agar mereka mampu menjadi pemelajar sepanjang hayat dan mampu beradaptasi serta menerima berbagai tantangan yang akan datang (Putra, 2023).

Kurikulum di SMK pada prinsipnya melibatkan dunia kerja dalam skema pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru, berorientasi pada penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila (Sunawardhani & Casmudi, 2022). Pada implementasi kurikulum di SMK-PK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan beberapa guru yang bersangkutan bergabung ke dalam Komite Pembelajaran yang berfungsi sebagai inisiator, stimulator, dan eksekutor perubahan di lingkungan sekolah (Tiraswati, 2022). Komite Pembelajaran ini bertujuan untuk memperkenalkan pembelajaran paradigma baru dan melaksanakan pelatihan atau *in-house training* bagi guru lain di sekolah agar guru siap dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka guna mendukung tercapainya tujuan SMK-PK. Meskipun telah dilaksanakan pelatihan bagi para guru mengenai Kurikulum Merdeka, beberapa penelitian menunjukkan

adanya permasalahan pada implementasi kurikulum yaitu para guru yang sudah paham mengenai kebijakan dan struktur Kurikulum Merdeka secara teori, tetapi masih terkendala dalam penerapannya dalam pembelajaran (Gunawan, 2022; Heryahya dkk., 2022; Kurnia & Novaliyosi, 2023; Septiana & Hanafi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum di sekolah tersebut, dijelaskan bahwa memang tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka karena keduanya merupakan kurikulum yang berpusat pada siswa (*student-centered*), dan tujuan pembelajaran yang disusun pun relatif sama, sehingga dalam penyusunan rencana pembelajaran tidak mendapatkan kesulitan yang substansial. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farwati dkk., (2022) dan Heryahya dkk., (2022) yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka, karena keduanya menuntut guru dan siswa untuk memiliki kompetensi abad ke-21 dan karakter yang baik, sehingga pada proses penyusunan rencana pembelajaran, guru sudah siap karena tidak terdapat kesulitan yang signifikan. Meski demikian, terdapat perbedaan antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013, yang terlihat dari digantinya kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran, berubahnya status mata pelajaran, pemberian wewenang kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional secara mandiri, struktur kurikulum yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penggantian penjurusan dengan kelompok mata pelajaran pilihan, dan mengutamakan asesmen formatif dibandingkan sumatif dalam proses penilaian capaian pembelajaran (Hamdi dkk., 2022; Mardiyah dkk., 2023).

Meskipun telah dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan guru-guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, para guru masih terkendala dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendukung siswa untuk lebih aktif di kelas. Kurikulum Merdeka sejatinya merupakan upaya pemerintah agar guru dapat lebih “merdeka” atau leluasa merancang suasana belajar yang interaktif, bermakna, dan mendalam bagi siswa, tetapi terdapat pula guru yang merasa kesulitan karena banyaknya hal yang harus direncanakan untuk mendukung pembelajaran tersebut (Kemendikbud, 2023). Pada penelitian lain,

ditemukan bahwa masih terdapat guru yang memiliki kesulitan untuk mengoperasikan dan mengintegrasikan teknologi yang mendukung siswa untuk aktif dan mampu berpikir kritis sebagai bentuk kompetensi abad ke-21 (Heryahya dkk., 2022; Septiana & Hanafi, 2022; Syaripudin dkk., 2023).

Guru perlu memiliki pemahaman yang baik dan mendalam tentang konsep, tujuan, dan metode pembelajaran yang diusung dalam Kurikulum Merdeka, serta mampu mengadaptasi strategi pembelajaran yang sesuai. Akan tetapi, pada kenyataannya guru belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang kurikulum Merdeka sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasi kurikulum, khususnya dalam aspek perencanaan pembelajaran. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan kondisi empiris dan hasil beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara persepsi guru dan kesiapannya dalam perencanaan pembelajaran pada Kurikulum Merdeka di jenjang SMK.

1.2 Rumusan Masalah

Secara khusus, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru mengenai Kurikulum Merdeka pada jenjang SMK Negeri 11 Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat kesiapan guru dalam perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 11 Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi guru SMK Negeri 11 Kota Bandung mengenai Kurikulum Merdeka dengan kesiapannya dalam perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi guru mengenai Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 11 Kota Bandung.

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesiapan guru dalam perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 11 Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis hubungan antara persepsi guru SMK Negeri 11 Kota Bandung mengenai Kurikulum Merdeka dengan kesiapannya dalam perencanaan Kurikulum Merdeka.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan kurikulum pembelajaran di Indonesia, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai persepsi guru terhadap Kurikulum Merdeka dan kesiapan guru dalam perencanaan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, serta menjadi referensi untuk penelitian lain di bidang pengembangan kurikulum.

b. Secara praktis

1) Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya persepsi guru mengenai Kurikulum Merdeka dan kesiapannya dalam implementasi kurikulum, sehingga dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan SMK di Kota Bandung.

2) Bagi pihak sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dan kebutuhan sekolah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi program studi di sekolah.

3) Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi mengenai bagaimana proses pembelajaran dan implementasikan Kurikulum Merdeka telah dilaksanakan, dan menjadi acuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan pemahamannya mengenai Kurikulum Merdeka.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian skripsi ini disusun atas lima bab, berdasarkan Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka berisi konsep, landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan hipotesis dari penelitian yang sedang dilaksanakan.
3. Bab III Metodologi Penelitian membahas desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan berisi temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
5. Bab V Simpulan dan Rekomendasi berisi simpulan dan rekomendasi yang membahas penafsiran dan pemaknaan mengenai temuan penelitian.